
Analisis Struktur Jejaring Kebijakan dalam Penanganan Masalah Publik di Kota Bandung

Rizky Ilhami

Universitas Padjajaran

rizkyilhami@unpad.ac.id

Abstract: *Urban public issues are highly complex and involve various actors with different interests and resources. As a large city, Bandung faces a variety of public issues that require a collaborative policy approach. This study aims to analyze the policy network structure in handling public issues in Bandung. This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical research type. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies, then analyzed using a policy network structure perspective. The results show that the policy network structure in Bandung is still dominated by government actors and tends to be hierarchical and fragmented. Inter-actor connectivity is not yet optimal, the participation of non-government actors is still limited, and the distribution of roles in the policy network is not yet balanced. This condition has an impact on weak cross-sector coordination, low community participation, and ineffective handling of public issues. This study concludes that the structuring of an inclusive, connected, and trust-based policy network is key to improving the effectiveness of public issue handling in Bandung City.*

Keywords: *policy network, network structure, public issues, Bandung City.*

Abstrak: Permasalahan publik perkotaan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan serta sumber daya yang berbeda. Kota Bandung sebagai kota besar menghadapi beragam masalah publik yang menuntut pendekatan kebijakan yang kolaboratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur jejaring kebijakan dalam penanganan masalah publik di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif struktur jejaring kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur jejaring kebijakan di Kota Bandung masih didominasi oleh aktor pemerintah dan cenderung bersifat hierarkis serta terfragmentasi. Keterhubungan antaraktor belum optimal, partisipasi aktor non-pemerintah masih terbatas, dan distribusi peran dalam jejaring kebijakan belum seimbang. Kondisi ini berdampak pada lemahnya koordinasi lintas sektor, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurang efektifnya penanganan masalah publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penataan struktur jejaring kebijakan yang inklusif, terhubung, dan berbasis kepercayaan menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penanganan masalah publik di Kota Bandung.

Kata kunci: jejaring kebijakan, struktur jejaring, masalah publik, Kota Bandung.

1. PENDAHULUAN

Kota Bandung menghadapi banyak masalah publik perkotaan, termasuk kemacetan lalu lintas, pengelolaan limbah, kemiskinan perkotaan, dan layanan publik yang tidak memadai. Mengatasi isu-isu kompleks ini membutuhkan pendekatan kebijakan multifaset yang melampaui tata kelola hierarkis tradisional, menekankan kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan (Herdiani & Natsir, 2025). Perencanaan kota yang berkelanjutan sangat penting untuk meminimalkan dampak lingkungan sambil mempromosikan kesetaraan sosial dan pertumbuhan ekonomi, terutama dalam pengaturan tata ruang dan pemberian layanan publik (Bhatara, 2024). Selain itu, strategi pengurangan kemiskinan perkotaan harus dilaksanakan untuk memberdayakan rumah tangga berpenghasilan rendah dan meningkatkan

akses mereka ke layanan penting, sehingga mengurangi ketidaksetaraan . Inisiatif kota pintar dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya tanggap perkotaan, terutama dalam mengelola lalu lintas dan limbah (Daniswara et al., 2025) . Akhirnya, kebijakan mitigasi kemacetan lalu lintas yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup di Bandung, mempromosikan moda transportasi alternatif, dan meningkatkan kualitas udara.

Pendekatan jaringan kebijakan sangat penting untuk memahami interaksi antara berbagai aktor dalam pembuatan kebijakan publik, karena menekankan hubungan struktural yang membentuk dinamika ini. Jaringan kebijakan terdiri dari beragam aktor, masing-masing dengan kepentingan, sumber daya, dan otoritas yang berbeda, yang secara kolektif mempengaruhi efektivitas penanganan masalah publik (Saber & Gomaa, 2020) . Tingkat keterkaitan di antara para aktor ini, posisi pusat mereka dalam jaringan, dan pola koordinasi merupakan faktor penting yang menentukan seberapa efektif kebijakan dirumuskan dan dilaksanakan . Selain itu, tata kelola kolaboratif memainkan peran penting dalam meningkatkan interaksi ini, karena mendorong kerja sama antara pemangku kepentingan yang berbeda untuk mengatasi masalah kebijakan yang kompleks (Sukandi,A,2024). Dengan menganalisis jaringan ini melalui kerangka kerja seperti teori jaringan aktor, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang konstruksi dan fungsi upaya kolaboratif ini, yang pada akhirnya mengarah pada hasil kebijakan yang lebih baik .

Di Kota Bandung, kompleksitas penanganan isu-isu publik diperburuk oleh jaringan kebijakan yang ada, yang seringkali gagal memfasilitasi kolaborasi yang efektif antara berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kinerja jaringan kebijakan ini terhambat oleh ketidaksetaraan peran interaktor dan koordinasi lintas sektor yang lemah, yang mengarah pada dominasi pemangku kepentingan tertentu atas yang lain (Miftah et al., 2024) . Ketidakseimbangan ini dapat menghambat keterlibatan pemangku kepentingan, yang sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan semua pihak dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan . Selain itu, kurangnya kemitraan lintas sektor yang kuat membatasi potensi munculnya solusi inovatif, karena organisasi kehilangan peluang untuk memanfaatkan kekuatan satu sama lain (Hadi et al., 2020) .

Di Kota Bandung, peningkatan kolaborasi dan kesetaraan di antara para pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai hasil kebijakan yang lebih baik dan meningkatkan layanan publik. Efektivitas kebijakan publik secara signifikan dipengaruhi oleh struktur jaringan kebijakan; jaringan terbuka dan inklusif memfasilitasi kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan, sementara struktur tertutup dan terfragmentasi dapat menghambat efektivitas kebijakan (Ilhami, 2023). Dengan mendorong kolaborasi pemangku kepentingan,

pembuat kebijakan dapat memastikan beragam perspektif terintegrasi, yang mengarah pada peningkatan pelayanan publik (Bhatara, 2024) . Praktik tata kelola kolaboratif semakin meningkatkan proses ini dengan membangun kepercayaan dan legitimasi di antara para pemangku kepentingan, yang penting untuk mengatasi masalah publik secara efektif (Sumiati & Aulia, 2024) .

Jaringan kebijakan yang terkoordinasi dengan baik yang menekankan keterlibatan pemangku kepentingan sangat penting untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup warga di Bandung . Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur jejaring kebijakan dalam penanganan masalah publik di Kota Bandung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian jejaring kebijakan serta kontribusi praktis bagi perumusan strategi tata kelola kebijakan publik yang lebih kolaboratif dan efektif di tingkat kota.

2. KAJIAN PUSTAKA

1. Jejaring Kebijakan dan Struktur Jejaring

Jejaring kebijakan (policy networks) merupakan pendekatan yang melihat kebijakan publik sebagai hasil interaksi antaraktor yang saling bergantung dalam suatu struktur hubungan yang relatif stabil. Rhodes (1997) mendefinisikan jejaring kebijakan sebagai pola hubungan antara aktor pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat dalam proses kebijakan, di mana tidak ada satu aktor pun yang memiliki kendali penuh atas kebijakan. Struktur jejaring kebijakan merujuk pada pola hubungan antaraktor dalam jejaring, termasuk tingkat keterhubungan, posisi aktor, dan distribusi kekuasaan. Marsh dan Smith (2000) menjelaskan bahwa struktur jejaring kebijakan memengaruhi bagaimana informasi, sumber daya, dan pengaruh mengalir dalam proses kebijakan. Aktor yang menempati posisi sentral dalam jejaring cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah kebijakan.

2. Masalah Publik dalam Kebijakan Publik

Masalah publik merupakan kondisi atau situasi yang memengaruhi kepentingan masyarakat luas dan memerlukan intervensi pemerintah. Dunn (2018) menyatakan bahwa masalah publik bersifat konstruktif dan politis, karena didefinisikan melalui proses sosial dan politik dalam kebijakan publik. Penanganan masalah publik tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dengan dinamika aktor dan kepentingan yang terlibat. Dalam konteks perkotaan, masalah publik cenderung bersifat kompleks dan saling terkait, seperti kemacetan, pengelolaan sampah, kemiskinan, dan pelayanan publik. Kompleksitas tersebut menjadikan

penanganan masalah publik memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor. Pendekatan jejaring kebijakan memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap bagaimana masalah publik didefinisikan, dirumuskan, dan ditangani melalui interaksi antaraktor.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam struktur jejaring kebijakan dalam penanganan masalah publik di Kota Bandung. Analisis struktur jejaring kebijakan digunakan untuk mengkaji pola hubungan, posisi aktor, serta mekanisme interaksi antaraktor dalam proses kebijakan publik. Penelitian dilaksanakan di Kota Bandung dengan fokus pada penanganan masalah publik perkotaan. Fokus analisis diarahkan pada struktur jejaring kebijakan yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, komunitas warga, dan aktor lain yang berperan dalam penanganan masalah publik.

4. HASIL & PEMBAHASAN

Hasil temuan dilapang dapat diidentifikasi Permasalahan Empiris Penanganan Masalah Publik di Kota Bandung, antara lain .

Penanganan masalah publik di Kota Bandung melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah daerah, DPRD, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas warga. Namun, koordinasi antaraktor tersebut belum terintegrasi secara optimal. Hubungan kerja antarinstansi pemerintah maupun antara pemerintah dan aktor non-pemerintah masih cenderung bersifat sektoral, sehingga penanganan masalah publik sering berjalan parsial dan tidak berkelanjutan.

Struktur jejaring kebijakan di Kota Bandung masih didominasi oleh aktor pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Dominasi ini menyebabkan peran aktor non-pemerintah, seperti komunitas warga dan organisasi masyarakat sipil, belum sepenuhnya terakomodasi dalam proses penanganan masalah publik. Ketimpangan posisi aktor ini berdampak pada rendahnya partisipasi dan lemahnya inovasi kebijakan.

Keterhubungan antara komunitas warga dengan aktor kebijakan lainnya masih terbatas. Banyak komunitas bergerak secara mandiri tanpa terhubung secara struktural dalam jejaring kebijakan kota. Kondisi ini menghambat aliran informasi, pertukaran sumber daya, dan sinergi dalam penanganan masalah publik, seperti pengelolaan sampah dan penataan lingkungan.

Akses terhadap informasi kebijakan dan sumber daya belum merata di antara aktor-aktor dalam jejaring kebijakan. Aktor tertentu memiliki akses informasi dan sumber daya yang lebih besar dibandingkan aktor lainnya, terutama masyarakat dan komunitas di tingkat akar rumput. Ketimpangan ini memengaruhi posisi tawar aktor dan efektivitas jejaring kebijakan dalam menyelesaikan masalah publik.

Perubahan kebijakan dan program yang sering terjadi berdampak pada keberlanjutan penanganan masalah publik. Dalam struktur jejaring kebijakan, kondisi ini menunjukkan lemahnya mekanisme koordinasi dan komitmen bersama antaraktor. Akibatnya, kebijakan publik yang dihasilkan cenderung bersifat jangka pendek dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Struktur jejaring kebijakan di Kota Bandung belum sepenuhnya didukung oleh mekanisme evaluasi dan umpan balik yang melibatkan berbagai aktor. Evaluasi kebijakan masih didominasi oleh pemerintah, sehingga masukan dari masyarakat dan aktor non-pemerintah belum terintegrasi secara sistematis dalam perbaikan kebijakan.

Hubungan antaraktor dalam penanganan masalah publik masih diwarnai oleh rendahnya tingkat kepercayaan. Kurangnya transparansi dan komunikasi yang efektif menyebabkan aktor cenderung bekerja secara terpisah. Kondisi ini menghambat terbentuknya struktur jejaring kebijakan yang kolaboratif dan responsif.

Permasalahan empiris penanganan masalah publik di Kota Bandung menunjukkan bahwa tantangan utama tidak hanya terletak pada substansi kebijakan, tetapi juga pada struktur jejaring kebijakan yang belum optimal. Oleh karena itu, analisis struktur jejaring kebijakan menjadi penting untuk memahami bagaimana pola hubungan antaraktor memengaruhi efektivitas penanganan masalah publik di tingkat kota.

Pembahasan

Struktur Jejaring Kebijakan dalam Penanganan Masalah Publik di Kota Bandung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur jejaring kebijakan dalam penanganan masalah publik di Kota Bandung masih bersifat hierarkis dan belum sepenuhnya kolaboratif. Pemerintah daerah menempati posisi sentral dalam jejaring kebijakan, sementara aktor non-pemerintah, seperti organisasi masyarakat sipil dan komunitas warga, berada pada posisi perifer. Struktur jejaring yang tidak seimbang ini memengaruhi aliran informasi, distribusi sumber daya, serta proses pengambilan keputusan dalam penanganan masalah publik.

Keterbatasan keterhubungan antaraktor menyebabkan jejaring kebijakan di Kota Bandung cenderung terfragmentasi. Hubungan antarinstansi pemerintah belum terkoordinasi secara optimal, sementara keterlibatan komunitas warga masih bersifat sporadis dan tidak terlembagakan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas kebijakan publik, khususnya dalam menangani masalah publik yang membutuhkan respons lintas sektor dan partisipasi masyarakat.

Selain itu, ketimpangan akses informasi dan sumber daya memperkuat dominasi aktor tertentu dalam struktur jejaring kebijakan. Aktor yang memiliki posisi sentral lebih mudah memengaruhi agenda dan arah kebijakan, sementara aktor perifer memiliki keterbatasan dalam menyuarakan kepentingan masyarakat. Lemahnya mekanisme evaluasi dan umpan balik juga menunjukkan bahwa struktur jejaring kebijakan belum mendukung proses pembelajaran kebijakan yang berkelanjutan.

Rendahnya tingkat kepercayaan antaraktor semakin memperlemah struktur jejaring kebijakan di Kota Bandung. Ketidakpercayaan ini menghambat kolaborasi, mengurangi keterbukaan informasi, dan mendorong aktor untuk bekerja secara terpisah. Dengan demikian, efektivitas penanganan masalah publik sangat dipengaruhi oleh bagaimana struktur jejaring kebijakan dibangun dan dikelola.

Solusi Kebijakan Berbasis Struktur Jejaring Kebijakan

- a) Pemerintah Kota Bandung perlu menata ulang struktur jejaring kebijakan dengan membuka ruang yang lebih besar bagi aktor non-pemerintah. Pelibatan komunitas warga, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta perlu dilembagakan secara formal dalam proses penanganan masalah publik.
- b) Konektivitas antaraktor dalam jejaring kebijakan perlu diperkuat melalui mekanisme koordinasi lintas sektor yang jelas dan berkelanjutan. Forum kolaborasi dan platform komunikasi bersama dapat menjadi sarana untuk meningkatkan keterhubungan antaraktor.
- c) Ketimpangan peran dalam struktur jejaring kebijakan perlu dikurangi dengan mendorong pembagian peran yang lebih seimbang. Aktor non-pemerintah perlu diberi ruang yang lebih besar dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik.
- d) Peningkatan transparansi dan pemerataan akses informasi kebijakan menjadi kunci dalam memperkuat struktur jejaring kebijakan. Akses informasi yang terbuka memungkinkan aktor perifer untuk berpartisipasi secara lebih aktif dalam penanganan masalah publik.

- e) Evaluasi kebijakan publik perlu dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai aktor dalam jejaring kebijakan. Mekanisme umpan balik yang inklusif dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan memperkuat pembelajaran kebijakan.
- f) Upaya membangun kepercayaan antaraktor perlu dilakukan melalui konsistensi kebijakan, komunikasi yang intensif, dan penguatan akuntabilitas. Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam membangun struktur jejaring kebijakan yang kolaboratif dan efektif.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur jejaring kebijakan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan efektivitas penanganan masalah publik di Kota Bandung. Kompleksitas masalah publik perkotaan menuntut keterlibatan berbagai aktor dengan kepentingan, sumber daya, dan kewenangan yang berbeda, sehingga pendekatan kebijakan yang bersifat hierarkis tidak lagi memadai. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa struktur jejaring kebijakan di Kota Bandung masih didominasi oleh aktor pemerintah dan cenderung bersifat hierarkis serta terfragmentasi. Keterhubungan antaraktor belum terbangun secara optimal, partisipasi aktor non-pemerintah masih terbatas, dan distribusi peran dalam jejaring kebijakan belum seimbang. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya koordinasi lintas sektor, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurang efektifnya penanganan masalah publik. Selain itu, ketimpangan akses informasi, lemahnya mekanisme evaluasi partisipatif, serta rendahnya tingkat kepercayaan antaraktor semakin memperlemah kinerja jejaring kebijakan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh struktur jejaring kebijakan yang mendasarinya. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa penataan struktur jejaring kebijakan yang lebih inklusif, terhubung, dan berbasis kepercayaan merupakan kunci dalam meningkatkan efektivitas penanganan masalah publik di Kota Bandung. Penguatan konektivitas antaraktor, redistribusi peran, serta peningkatan transparansi dan partisipasi menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola kebijakan publik yang kolaboratif dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

- Bhatara, H. (2024). Analisis Penelitian mengenai Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Inspirasi*, 15(1), 44–56. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v15i1.2340>
- Bhatara, H. (2024). Analisis Penelitian mengenai Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Inspirasi*, 15(1), 44–56. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v15i1.2340>
- Daniswara, N., Budirahayu, T., Ariadi, S., Reindrawati, D. Y., Abdillah, A., & Mutiara, A. (2025). Enhancing Urban Sustainability and Resilience: An Assessment of the Bandung Smart City Master Plan (2018-2023). *Grassroots Journal of Natural Resources*, 8(2), 358–391. <https://doi.org/10.33002/nr2581.6853.080218>
- Hadi, A., Rusli, B., & Alexandri, M. B. (2020). Policy Networks in the Implementation of 'Cities Without Slums' Program in Baleendah District, Bandung Regency. 10(2), 138–146. <https://doi.org/10.31289/JAP.V10I2.3622>
- Herdiani, H., & Natsir, L. F. (2025). ANALISIS STRATEGI PENGURANGAN KEMACETAN DI KOTA BANDUNG (Pendekatan Kolaborasi Kebijakan Transportasi). *Deleted Journal*, 15(2), 66–77. <https://doi.org/10.31943/inspirasi.v15i2.139>
- Ilhami, R. (2023). Strengthening Policy Networks to Create Effective Public Policies. *Neo Journal of Economy and Social Humanities*. <https://doi.org/10.56403/nejesh.v2i3.143>
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J.** (2016). Governance networks in the public sector. *Routledge*.
- Miftah, A. Z., Widianingsih, I., Muhtar, E. A., & Sutriadi, R. (2024). Behind the scenes of COVID-19 response: a social network analysis of policy actors in Bandung City. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2356351>
- Provan, K. G., & Kenis, P.** (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), 229–252. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum015>
- Rhodes, R. A. W.** (1997). Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability. *Open University Press*.
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M.** (2014). Theories of the policy process (3rd ed.). *Westview Press*.
- Sørensen, E., & Torfing, J.** (2011). Enhancing collaborative innovation in the public sector. *Administration & Society*, 43(8), 842–868. <https://doi.org/10.1177/0095399711418768>

- Sukandi, A. (2024). Analysis of opportunities and challenges for Subang city within the framework Rebana triangle economic region. *Journal of Law, Social Science and Humanities*, 2(1), 68-83.
- Sumiati, I., & Aulia, F. (2024). Pola Struktur dan Koordinasi Pentahelix dalam Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung. *Sang Pencerah*, 10(2), 541–555.
<https://doi.org/10.35326/pencerah.v10i2.5229>
- Widianingsih, I., & Morrell, E.** (2007). Participatory planning in Indonesia: Seeking a new path to democracy. *Policy Studies*, 28(1), 1–15.
<https://doi.org/10.1080/01442870601121463>